

LAPORAN HASIL

PENELITIAN DISERTASI DOKTOR



**DEMOKRATISASI DAN EFEKTIVITAS
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH KABUPATEN GOWA OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

**Risma Niswaty, S.S., M.Si
0026017205**

**Dibiayai oleh:
DIPA sesuai Kontrak Penelitian Nomor 1294/UN36/PL/2013
Tanggal 22 Mei 2013**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

TAHUN 2013

LAPORAN HASIL

PENELITIAN DISERTASI DOKTOR



**DEMOKRATISASI DAN EFEKTIVITAS
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH KABUPATEN GOWA OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

**Risma Niswaty, S.S., M.Si
0026017205**

**Dibiayai oleh:
DIPA sesuai Kontrak Penelitian Nomor 1294/UN36/PL/2013
Tanggal 22 Mei 2013**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TAHUN 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Demokratisasi dan Efektivitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : RISMA NISWATY S.S., M.Si

NIDN : 0026027206

Jabatan Fungsional :

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Nomor HP : 081343972223

Surel (e-mail) : risma.niswaty@gmail.com

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra :

Alamat :

Penanggung Jawab :

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 31.500.000,00

Biaya Keseluruhan : Rp. 0,00

Mengetahui
Direktur Pascasarjana UNM

Makassar, 14 - 12 - 2013,
Ketua Peneliti,

(Prof. Dr. H. Jasruddin, M.Si.)
NIP/NIK 196412221991031002

(RISMA NISWATY S.S., M.Si)
NIP/NIK 197201262003122004

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

(Prof. Dr. H. Jufri, M.Pd.)
NIP/NIK 195912311985031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN

Menara Pinisi Lt. 10-11 Kampus UNM Jl. A. Pangerang Pettarani, Makassar - 90222

Telepon (0411) 868879 Fax. 868879 Email: lemlitunm@yahoo.co.id

- * Puslit Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- * Puslit Pemberdayaan Perempuan
- * Puslit Budaya dan Seni Etnik Sulawesi

- * Puslit Makanan Tradisional, Gizi dan Kesehatan
- * Puslit Pengembangan Ilmu Pendidikan
- * Puslit Pemuda dan Olah Raga

SURAT KETERANGAN

No. 18/UN 36.9/PL/2014

Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar menerangkan bahwa :

Nama : Risma Niswaty, S.S.,M.Si
NIP : 19720126 200312 2004
Fakultas/Jurusan : FIS UNM / Pendidikan Ekonomi
Telah melaksanakan penelitian dengan judul :

Demokrasi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gowa Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, sebagai Ketua Peneliti
Skim Penelitian : Disertasi Doktor
Anggota tim peneliti : Tidak ada

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar mendokumentasikan Laporan Penelitiannya pada bulan Desember 2013

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Makassar, 13 Januari 2014

Ketua,

Prof. Dr. H. Jufri, M.Pd

NIP. 19591231 198503 1 016

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tata Kelola Pemerintahan Demokratis	4
2.2. Demokrasi dalam Pemerintahan dan Kebijakan Publik	6
2.3. Pemilihan Umum sebagai Wujud Demokrasi Penyelenggaraan Negara	7
2.4. Penyelenggara Pemilu yang Demokratis	9
2.5. Studi Pendahuluan	16
2.6. Penelitian Terdahulu yang Relevan	17
2.7. Kerangka Konseptual	18
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
3.1. Tujuan Penelitian	21
3.2. Urgensi (Keutamaan) Penelitian	21
BAB 4 METODE PENELITIAN	
4.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
4.2. Lokasi Penelitian	25
4.3. Sumber Data	25
4.4. Fokus Masalah Penelitian dan Deskripsi Fokus	27
4.5.. Instrumen Penjaring Data	28
4.6. Teknik Penjaringan dan Pengabsahan Data	28
4.7. Teknik Analisis Data	32

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Penerapan Prinsip Independensi dalam Penyelenggaraan 34

5.2. Penerapan Prinsip Imparsialitas oleh KPUD dalam

Penyelenggaraan Pemilukada Gowa Tahun 2010 54

5.3. Pelaksanaan Tugas secara Kompeten oleh KPUD dalam 81

Penyelenggaraan Pemilukada Gowa Tahun 2010

BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 91

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan 94

6.2. Saran dan Rekomendasi 97

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN 102

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip demokrasi dan efektivitas pemilukada oleh penyelenggara pemilu yaitu KPUD. Secara khusus, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis independensi KPU Gowa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 di Gowa; menganalisis imparialitas KPU Gowa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 di Gowa; dan menganalisis profesionalisme KPU Gowa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 di Gowa.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi perkembangan baru bagi ilmu administrasi publik dalam kajian evaluasi kebijakan publik khususnya kebijakan yang mendukung pembangunan demokrasi terkait pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dan memberikan kontribusi berupa rekomendasi bagi perbaikan kinerja KPU dan KPUD sebagai penyelenggara Pemilu untuk dapat melaksanakan Pemilukada yang lebih demokratis dan efektif.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara secara mendalam dan terstruktur, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi. Analisis data hasil pencatatan secara sistematis dari pelaksanaan pengumpulan data akan disajikan sebagai temuan hasil penelitian. Seluruh data yang diperoleh akan dilakukan sesuai langkah-langkah yang terdiri dari pemaparan data, reduksi data, *member check*, verifikasi data, penarikan kesimpulan, dan keabsahan data.

Luaran dari penelitian disertasi doktor ini adalah: disertasi yang mendapatkan persetujuan pembimbing dan publikasi ilmiah pada jurnal internasional. Selain itu, diharapkan pula agar hasil penelitian ini dapat disosialisasikan melalui seminar nasional yang memberikan kontribusi pemikiran baru bagi mahasiswa mengenai Ilmu Administrasi Publik dalam kajian demokrasi.

SUMMARY

This study aims to examine and analyze the effectiveness of the application of the principles of democracy and election by election organizers that the Election Commission . In particular , the purpose of this study is intended to analyze the independence of the Election Commission in the implementation of Gowa local elections and deputy regional head in Gowa 2010; analyze Gowa impartiality of the Commission in the implementation of the regional head and deputy regional head in 2010 in Gowa, and analyze professionalism in Gowa Commission implementation of the regional head and deputy regional head in 2010 in Gowa.

The benefits of this research are expected to provide a new development for the science of public administration in the evaluation study of public policy, especially policies that support the development of democracy regarding the conduct of elections of regional heads and deputy heads of regions and contribute to the recommendations for improving the performance of the Commission and the Election Commission as the election organizers in order to implement Election is more democratic and effective.

Data collection techniques used in this study is the observation, in-depth and structured interviews, focus group discussions (FGD), and documentation. Data analysis results in a systematic recording of the execution of the data collection will be presented as a result of research findings. All data obtained will be carried out according to the steps comprising the data exposure, data reduction, member check, verification of data, drawing conclusions, and validity of the data .

Outcome of this doctoral dissertation research are: the dissertation supervisor approval and scientific publications in international journals. In addition, it is also expected that the results of this research can be disseminated through national seminars that contribute new ideas to the students about the study of Public Administration in a democracy .

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bulan Juni 2005, melalui pengesahan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satu unsur di dalamnya mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung, maka bulan Juni 2005 menjadi sejarah pertama pelaksanaan Pilkada langsung. Setelah pelaksanaan Pilkada pada tahun 2005, maka pada tahun 2010 menjadi momentum periode kedua pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Setelah disyahnnya UU No.27 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan menjadikan Pilkada sebagai bagian dari Pemilu maka istilah Pilkada berubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).

Meskipun Pemilukada telah memasuki periode kedua pelaksanaannya atau setara dengan sepuluh tahun, namun ternyata dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada, tetap ditemukan sejumlah persoalan. Jika permasalahan Pemilukada 2010 diinventarisir, maka secara umum tahapan yang bermasalah adalah masalah pemutakhiran data pemilih yang menimbulkan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tahap pencalonan, tahap pengadaan dan distribusi logistic, tahap pemungutan dan penghitungan suara, serta tahap penetapan dan pelantikan calon terpilih.

Dari beberapa permasalahan dalam Pemilukada tersebut dapat dilihat dari kecenderungan maraknya tuntutan dari berbagai pasangan calon yang harus diproses oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sepuluh (10) kabupaten dari 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang melaksanakan Pemilukada pada tahun 2010, seluruhnya harus menghadapi persidangan karena adanya gugatan di MK. Salah satu daerah yang penyelenggaraannya Pemilukadanya digugat melalui MK maupun PTUN adalah kabupaten Gowa. Untuk Pemiukada Gowa, bukan saja harus menghadapi gugatan

tersebut, melainkan KPU Gowa harus pula menghadapi sidang Dewan Kehormatan (DK) sebagai akibat dari adanya laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran Kode Etik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Sulsel, pada sidang pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk KPU Gowa, diduga melakukan pelanggaran terutama atas tiga pasal. Pertama, KPU Gowa diduga melanggar Pasal 10 ayat 4 UU No.27 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kedua, diduga melanggar Pasal 60 UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dugaan pelanggaran ketiga adalah pada Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata 'Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 10 UU No.27 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut berkaitan dengan asas independensi, imparial, dan profesionalisme penyelenggara. Dapat dilihat bahwa bunyi Pasal tersebut adalah keharusan bagi KPU dan KPUD untuk memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan merata. Ini adalah substansi dari asas imparial. Pasal ini juga menyebutkan bahwa KPU dan KPUD harus menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat. Asas ini merupakan salah satu bentuk profesionalisme penyelenggara pemilu. Dengan demikian, jika KPU Gowa sebagai penyelenggara Pemilu yang seharusnya bersikap independen, imparial, dan kompeten tersebut diberhentikan karena adanya keputusan Dewan Kehormatan, maka menarik untuk mengkaji ketiga hal tersebut.

Melalui sudut pandang administrasi, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu Gowa 2010 tersebut merupakan amanat kebijakan yang secara simbolik mengatur perilaku masyarakat terhadap penghormatan akan nilai-nilai demokrasi. Argumentasi tersebut, secara kritis hendak menyatakan bahwa sesungguhnya, penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU Gowa sebagai institusi

demokrasi, berada dalam fluktuasi situasi yang kompleks yakni, mengimplementasikan produk kebijakan (administrasi publik) yang mengamanatkan substansi politik sekaligus. Hal mana, menurut Lev Kuleshov (1917) dapat menciptakan suatu *jukstaposisi*. Jukstaposisi ini dapat diamati melalui jenjang urutan langkah-langkah dalam determinan implementasi kebijakan, yang memiliki keterkaitan satu sama lain dengan substansi kebijakan yang justru sangat potensial menciptakan perlawanan makna terhadap implementasi kebijakan itu sendiri.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian ini, maka dirumuskanlah masalah penelitian ini yaitu demokratisasi KPU Gowa pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan, sebagai berikut:

1. Seberapa jauh prinsip independensi diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Gowa tahun 2010?
2. Seberapa jauh prinsip imparial diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Gowa tahun 2010?
3. Seberapa optimal kompetensi anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Gowa tahun 2010?

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Mengkaji tentang pemilu sebagai wujud pelaksanaan prinsip demokrasi dan penerapan regulasi oleh penyelenggara pemilu yaitu KPUD, maka dibutuhkan berbagai pustaka yang dapat memperkaya wawasan. Gagasan-gagasan yang penting untuk dikemukakan adalah yang terkait dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*), Demokrasi dalam Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Pemilu sebagai Wujud Demokrasi Penyelenggaraan Negara, dan Penyelenggara Pemilu yang Demokratis.

2.1. Tata Kelola Pemerintahan Demokratis

Gagasan mengenai demokrasi telah dikenal sejak awal dalam peradaban Yunani sekitar penghujung abad V sebelum Masehi. Demokrasi atau *demokratia* merupakan ungkapan dari kata *demos* yang sinonim dengan kata *populous* yang mengandung arti 'rakyat', dan *kratia* yang berarti pemerintahan atau wewenang. Dengan demikian, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat.

Dasar hukum *good governance* pada institusi pemerintahan menurut Patriadi (2004), pertama adalah TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Bersih, yang mencakup: (1) terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN; (2) terbentuknya penyelenggara negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat diseluruh wilayah negara, termasuk daerah terpencil dan perbatasan; (3) berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan. Kedua PP No. 1 Tahun 2000 tentang Pemerintahan yang baik, berisi antara lain: (1) pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima; (2) demokrasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan diterima oleh seluruh masyarakat.

Untuk membangun pemerintahan yang demokratis dibutuhkan adanya akses yang memungkinkan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses-proses pembuatan keputusan. Sebuah masyarakat sipil yang kuat merupakan salah satu prasyarat bagi demokrasi yang kuat, sekalipun diakui bahwa demokrasi mengizinkan berdirinya pengelompokan dan organisasi-organisasi yang memiliki ide dan sikap yang justru bertentangan dengan perdamaian, toleransi, dan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Penegakan konsep *good governance* pada institusi pemerintah memerlukan *action plan* atau agenda pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Tjokroamidjojo dalam Patriadi (2004: 79), ada 5 (lima) agenda yang harus dilaksanakan, yaitu: (i) perubahan sistem politik ke arah sistem politik yang demokratis, partisipatif dan egalitarian; (ii) reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI), dimana kekuatan militer harus menjadi kekuatan yang profesional dan *independent*; (iii) reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah; (iv) reformasi pemerintahan yang juga penting adalah perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi; (v) menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Untuk itu semua aparat institusi pemerintahan (birokrasi) perlu dipikirkan secara manusiawi berkaitan dengan *wealfare system*, *manpower planning* dan penegakan hukumnya.

Demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi harus didukung dan dipertahankan lewat sistem-sistem akuntabilitas demokratis. Untuk mendukung akuntabilitas demi tercapainya demokrasi, melalui sebuah Forum untuk Reformasi Demokratis yang digagas oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IIDEA), diajukan terbentuknya 5 (lima) pranata, yaitu: ombudsman, pemeriksa umum, komisi pemilihan yang independen, komisi hak asasi manusia, dan komisi fiskal dan keuangan.

2.2. Demokrasi dalam Pemerintahan dan Kebijakan Publik

Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni *Demokratia*. *Demos* artinya rakyat (*people*) dan *cratos* artinya pemerintahan atau kekuasaan (*rule*). Demokrasi berarti mengandung makna suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, bukan kekuasaan oleh raja atau kaum bangsawan.

Pemilu sebagai salah satu wujud demokrasi merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan legislatif. Menurut Palazzolo (2005), salah satu cara untuk mengukur kapasitas pemilu adalah menentukan atau menetapkan regulasi yang memenuhi standar-standar teknis pemungutan suara yang mengakomodir hak-hak masyarakat sebagai pemilih.

Tilly (2007) menyatakan, terdapat 4 (empat) pemahaman publik akan demokrasi. Keempat pemahaman itu berdampak pada perbedaan penafsiran dan implementasi pemerintah suatu negara dalam mengadopsi konsep demokrasi. Keempat definisi mengenai demokrasi itu terdiri atas : Demokrasi secara Konstitusional (*constitutional*); Demokrasi secara Substantif (*substantive*); Demokrasi secara Prosedural (*procedural*); dan Demokrasi secara Orientasi Proses (*process-oriented*).

Titik perhatian pada pemilihan umum ini krusial, oleh sebab lewat prosedur tersebut perubahan kebijakan dan personil pemerintahan akan terjadi. Jika prosedur pemilihan umum tidak mengandung nuansa kompetitif, penganut aliran procedural ini menganggap suatu negara tidaklah demokratis. Ini misalnya terjadi di pemilu-pemilu Indonesia era Orde Baru. Pemilu-pemilu yang terjadi tidaklah kompetitif oleh sebab negara ikut serta dalam pemilu lewat salah satu kontestannya.

Suatu organisasi bernama Freedom House mengkategorikan, prosedur dari suatu demokrasi adalah : Sistem politik multipartai yang kompetitif; Hak pilih universal bagi orang-orang dewasa; Adanya pemilu periodik yang mengandung asas langsung, umum, bebas, dan rahasia; dan Warganegara dapat mengakses informasi seputar partai politik yang ikut bersaing secara terbuka.

Problem utama yang kerap muncul dalam suatu demokrasi adalah peran negara. Cukup banyak negara yang termasuk demokratis, menurut salah satu dari keempat pengertian tersebut, yang menemui hambatan dalam menjalankan pemerintahannya. Di jaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. seperti diketahui dari penelitian Peaslee (1950: 8), dari 83 UUD negara – negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat (90 persen).

2.3. Pemilihan Umum sebagai Wujud Demokrasi Penyelenggaraan Negara

Sebuah pertanyaan diajukan oleh Surbakti (2008: 9-10) mengenai demokrasi yang dipilih menjadi salah satu pilar penyelenggaraan negara. Menurutny, jawaban atas pertanyaan ini membawa kita pada apa dan di mana letak pentingnya demokrasi sebagai suatu sistem politik. *Pertama*, demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik. *Kedua*, demokrasi menjamin sejumlah hak asasi bagi warga negara, yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratik. *Ketiga*, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negara daripada alternatif lain yang memungkinkan. *Keempat*, demokrasi membantu orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka. *Kelima*, hanya pemerintahan yang demokratik yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga negara untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu hidup dibawah hukum yang mereka pilih sendiri. *Keenam*, hanya pemerintahan demokratik yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral, termasuk akuntabilitas pemegang kekuasaan kepada rakyat yang menjadi konsituten. *Ketujuh*, demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan. *Kedelapan*, hanya pemerintah yang demokratik yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi. *Kesembilan*, negara-negara demokrasi perwakilan modern

tidak pernah berperang satu sama lain. *Kesepuluh*, negara-negara dengan pemerintahan yang demokratik cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratik.

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008). Pemilihan umum yang telah diselenggarakan di Indonesia terdiri atas tiga jenis, yaitu (1) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, (2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan (3) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan umum menurut perspektif kontrol rakyat merupakan komunikasi politik atau aktivitas penyampaian pesan (*messages*) untuk memilih pemerintahan, bukan untuk mengomunikasikan kebijakan atau memberikan mandat untuk membuat program tertentu.

Menurut Supriyanto (2007: 23) dalam pengantarnya, terdapat sejumlah standar yang dikenal secara internasional, yang menjadi tolok ukur demokratis atau tidak demokratisnya sebuah pemilu. Standar internasional ini menjadi syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis. Mengutip gagasan dari IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*), terdapat indikator dari standar internasional yang meliputi 15 (lima belas) aspek, yaitu: Penyusunan kerangka hukum; Pemilihan sistem pemilu; Penetapan daerah pemilihan; Hak untuk memilih dan dipilih; Badan penyelenggara pemilu; Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; Akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; Kampanye pemilu yang demokratis; Akses ke media dan kebebasan berekspresi; Pembiayaan dan pengeluaran; Pemungutan suara; Penghitungan dan rekapitulasi suara; Peranan wakil partai dan kandidat; Pemantauan pemilu; dan Penataan dan penegakan peraturan pemilu

Kelima belas aspek tersebut saling terkait dan secara bersama-sama menjadi faktor penentu terselenggaranya pemilu yang demokratis. Dengan demikian, jika terdapat satu aspek yang berjalan kurang baik, maka hal itu akan memengaruhi aspek-aspek yang lain, sehingga secara keseluruhan akan berdampak pada kualitas pemilu.

Salah satu pendekatan untuk menunjukkan relevansi demokrasi dengan pemilihan umum adalah melihat demokrasi dari segi lingkup dan intensitas partisipasi warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Pendekatan ini membedakan status demokrasi pada empat tingkat yang berbeda, yaitu demokrasi prosedural, demokrasi agregatif, demokrasi deliberatif, dan demokrasi partisipatoris.

2.4. Penyelenggara Pemilu yang Demokratis

Setiap lembaga atau organisasi, dalam aktivitas kesehariannya untuk pencapaian tujuan lembaga atau organisasi mengandalkan pada kinerja karyawan atau pegawai. Pada kondisi ini, maka sebuah lembaga atau organisasi diharapkan memiliki sumber daya-sumber daya yang handal. Sumber daya dimaksud tentu saja terkait dengan sumber daya manusia dan pendukungnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan sebuah lembaga negara yang dalam aktivitasnya melibatkan unsur independen dalam keanggotaan KPU dan KPUD serta pegawai negeri sipil dalam struktur organisasi kesekretariatannya.

Dalam menyelenggarakan aktivitas organisasinya sebagai Penyelenggara Pemilu, KPU menerapkan 12 (dua belas) asas, yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Kedua belas asas tersebut melengkapi kedudukan dan susunan organisasi KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional, dalam hal ini mengandung makna bahwa

KPU secara struktural berjenjang atau hirarkis. Hal ini menjadi landasan dibentuknya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota.

Untuk penatalaksanaan organisasi KPU disusunlah tata kerja yang berupa pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja, yang berlaku untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Beberapa asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis, tertuang dalam perundang-undangan dan regulasi KPU. Penjabaran asas demokrasi tampak dalam visi dan misi KPU. Dalam visi KPU tercantum bahwa visi KPU adalah terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi tersebut, selanjutnya diperkuat pula dengan adanya misi KPU, yaitu :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Jika pada proses persiapan Pemilu Tahun 2004, kelembagaan KPU diatur dalam UU No.12 Tahun 2003, maka untuk persiapan Pemilu 2009 kelembagaan KPU sebagai penyelenggara ditetapkan melalui UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Perubahan UU ini berimplikasi pada berubahnya jumlah personil KPU. Untuk keanggotaan KPU berjumlah 7 orang sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota berjumlah 5 orang.

Untuk penatalaksanaan organisasi KPU disusunlah tata kerja yang berupa pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja,

yang berlaku untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pilkada.

Secara hirarkis, KPU sebagai penyelenggara Pemilu memiliki karakteristik kepemimpinan dan budaya organisasi tersendiri. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan sebuah kajian ilmiah. Kepemimpinan dalam kebijakan terjadi manakala individu atau kelompok memusatkan perhatian pada isu atau masalah dan mengangkatnya ke agenda publik, mendorong terciptanya aksi-aksi kolaboratif dan terpusat oleh para stakeholder untuk mengatasi isu tersebut, dan menjalankan aksi-aksi berkesinambungan dalam implementasinya. Seorang pemimpin kebijakan dalam konteks kebijakan publik terkait adalah orang yang dapat menstimulasi aksi-aksi kolektif terhadap sasaran tertentu manakala tidak ada satu instansi atau kewenangan hukum lainnya yang memiliki kekuatan sumberdaya, pengaruh, atau kewenangan yang memadai—untuk menetapkan solusi umumnya.

Terkait dengan penyelenggara pemilu, Birch (2007: 2) menuliskan bahwa dalam penelitiannya mengenai kecenderungan sistem penyelenggara pemilu yang diberlakukan di 24 negara pecahan Uni Sovyet, maka mengutip Lopez-Pintor (2000), Birch menyajikan data bahwa 53 persen penyelenggara pemilu adalah merupakan lembaga independen, 20 persen dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara, dan 27 persen dilaksanakan oleh pemerintah namun di bawah pengawasan lembaga nonpemerintah. Melihat kecenderungan tersebut, Birch menjelaskan pula bahwa

berdasarkan temuannya, pemilu yang diselenggarakan oleh lembaga independen jauh lebih menghasilkan pemilu yang jujur dan adil.

Mengenai penyelenggara pemilu yang efektif dan demokratis, Baxter (1997: 1-13) mengajukan tiga prasyarat untuk memenuhi kriteria pemilu yang efektif dan demokratis, yaitu independensi, imparial, dan kompetensi penyelenggara pemilu. Dijelaskan oleh Baxter bahwa komisi pemilihan umum terbagi ke dalam 2 tipe. Tipe pertama adalah KPU yang dirancang sebagai organisasi di mana KPU bertindak sebagai pembuat atau penyusun kebijakan yang secara administratif memiliki kekuatan dukungan sumber daya dari para pegawai. Tipe kedua adalah para penyelenggara pemilu yang secara aktif dalam kesehariannya bertindak sebagai pelaksana administrasi kepiluan. Berdasarkan pada penelitiannya terkait pemilu di Afrika, Baxter mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pemilu selalu saja terdapat celah yang memungkinkan pemilu terselenggara secara tidak demokratis dan tidak efektif. Berangkat dari temuan-temuan penelitiannya, maka Baxter mengajukan tiga karakteristik fundamental yang berbasis pada sistem manajemen penyelenggaraan pemilu.

Menelusuri tiga karakteristik fundamental pemilu yang demokratis dan efektif menurut Baxter (1997: 1-13), maka gagasan tersebut terdiri dari:

- a. Independensi (*Independence*): yaitu kebebasan penyelenggara pemilu untuk bebas bertindak dan melakukan tindakan yang berasas pada kepentingan

pemilih (*voters*) dan bukan berdasarkan pada kepentingan partai ataupun kandidat tertentu. Karakteristik ini bertujuan untuk membangun kepercayaan sehingga semua unsur dapat menghargai (*respect*) proses dan hasil (*result*) pemilu.

- b. Imparsialitas (*impartiality*): serupa dengan independensi, karakteristik imparsial juga bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Secara umum, penyelenggara pemilu selayaknya terdiri dari individu yang menjunjung tinggi prinsip imparsial sehingga mereka dapat berlaku adil dan memberikan keseimbangan/kesetaraan. Untuk memperoleh kepercayaan dari parpol maupun masyarakat, penyelenggara pemilu harus menerapkan hukum dan regulasi secara konsisten dan terkendali.

Agar setiap tahapan pemilu berjalan dengan prinsip imparsial, maka prosedur setiap tahapan harus disampaikan secara transparan kepada parpol dan publik/masyarakat.

- c. Kompetensi (*competence*): sebuah lembaga penyelenggara yang independen dan imparsial tidak akan bermakna jika masih terdapat pemilih yang tidak terdaftar, lolosnya kandidat/calon yang tidak berkualitas, tidak terlaksananya pelatihan teknis pemilu, ataupun pemungutan suara yang bergeser dari jadwal. Masyarakat dan parpol harus dapat menjadi saksi bahwa penyelenggara pemilu memiliki kapabilitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan tahapan pemilu yang tidak sesuai jadwal, kerancuan

dan kebingungan dalam pelaksanaan tugas operasional oleh para pegawai di KPU, rendahnya komunikasi dan dialog antara penyelenggara pemilu dengan parpol dan media, ataupun hal-hal lainnya yang kurang terorganisir dan tidak dikomunikasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu, dapat menimbulkan ketidekefektivan kinerja penyelenggara pemilu.

Lebih jauh lagi, Baxter (1997: 1-13) secara implisit memberikan beberapa batasan yang melingkupi ketiga indikator, yaitu independensi, imparialitas, dan kompetensi.

1) Fokus Independen

Baxter (1997) memberikan batasan bahwa independensi penyelenggara pemilu seharusnya: bebas dari campur tangan kekuasaan pemerintah/elit politik dalam pembentukannya; keanggotaannya tidak melibatkan individu yang terlibat dengan partai politik; lembaga penyelenggara pemilu memiliki struktur yang berjenjang/ada di setiap tingkatan; dan keanggotaannya terbuka pada keragaman latar belakang pekerjaan.

2) Fokus Imparsial

Ada dua aspek menurut Baxter (1997: 11-12) yang terkait dengan imparialitas penyelenggara pemilu, yaitu: menerapkan hukum dan aturan pemilu secara adil dan merata kepada peserta pemilu dan konstituen pemilu; serta memperlakukan peserta pemilu dan masyarakat setara dan tidak berpihak kepada unsur atau golongan tertentu.

3) Fokus Kompetensi

Baxter (1997: 12-13) menekankan bahwa kompetensi penyelenggara pemilu yang demokratis dan efektif mensyaratkan: terlaksananya pelatihan-pelatihan teknis bagi penyelenggara pemilukada; adanya informasi bagi publik mengenai tahapan pemilukada dan sistem pemilukada; tersedianya pendidikan pemilih terkait teknis pemilukada yang ditujukan kepada masyarakat sebagai pemilih; dan secara berkala dilakukan pelaporan mengenai tahapan pemilukada.

2.5. Studi Pendahuluan

Untuk mendukung pelaksanaan penelitian mengenai demokratisasi penyelenggaraan pemilukada di Gowa tahun 2010 tersebut, maka telah dilakukan studi pendahuluan. Mengingat bahwa objek penelitian ini adalah pada peristiwa yang telah terjadi (*post factum*), maka studi yang dilakukan adalah studi dokumenter berdasarkan dokumentasi yang menjadi arsip KPU Gowa dan KPU Sulsel. Selain itu, pengalaman personal peneliti selama bekerja sebagai salah satu komisioner KPU Gowa sejak tahun 2003-2010 menjadi salah satu piranti Hal ini sejalan dengan pandangan Denzin dan Lincoln (2009: 497) yang memasukkan metode pengalaman personal sebagai salah satu metode pengumpulan data empiris dalam penelitian kualitatif. Menurutnya, pengalaman personal merefleksikan ide, gagasan, dan makna pengalaman individu tertentu pada situasi kekinian. Jika pengalaman saling terkait, maka memahaminya berfungsi sebagai sebuah rentetan kisah.

2.6. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari penelusuran dokumentasi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berfokus pada demokrasi dan pemilu, peneliti menemukan salah satu penelitian yang relevan terkait dengan demokrasi dan pemilu. Hasil penelitian yang dalam pandangan peneliti cukup relevan dengan fokus demokratisasi penyelenggara pemilu yang peneliti kaji adalah disertasi yang disusun oleh Munandar (2011). Disertasi Munandar tersebut berjudul “Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004. Disertasi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan ragam studi kasus yang mengidentifikasi pola pengelompokan/faksionalisasi yang ada di PKS, sekaligus menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok/faksi-faksi tersebut bekerja dalam dinamika internal PKS, khususnya pasca Pemilu 2004.

Sebuah hasil penelitian lainnya yang juga menarik dan relevan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Huda (2011) yang berfokus pada pelanggaran Pemilukada. Huda (2011) menuliskan hasil penelitiannya dengan judul ‘Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif’. Dalam penelitiannya tersebut, Huda menemukan bahwa Pola pelanggaran Pemilukada secara langsung dan praktik MK dalam mengadili perselisihan hasil Pemilukada mengalami perkembangan pesat.

Pemilihan umum sebagai objek kajian juga dilakukan oleh Hakim (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di

Indonesia pada Era Reformasi”. Penelitian Hakim tersebut membahas mengenai pembentukan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum dengan focus pembahasan pada penyelenggara Pemilu, peserta pemilu, dan system pemilihan pada era reformasi. Dalam pembahasannya, dilengkapi pula dengan kajian mendalam mengenai implementasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan system pemilihan. Terdapat lima kesimpulan sebagai temuan dalam penelitian Hakim (2012), yaitu: 1) Politik hukum dalam pembentukan hukum terkait pemilihan umum belum berbasis pada demokrasi dan perbaikan system, melainkan lebih didasari pada kepentingan Partai politik belaka; 2) Terdapat metamorphosis penyelenggara Pemilu; 3) Persyaratan peserta pemilu yang semakin ketat; 4) Sistem proporsional yang berkembang; dan 5) Ambang batas yang berubah.

2.7. Kerangka Konseptual

Untuk mengkaji demokratisasi dan efektivitas kinerja penyelenggara Pemilu pada Gowa tahun 2010 maka digunakan gagasan dari Baxter (1997) yang mengajukan tiga prasyarat untuk memenuhi kriteria pemilu yang efektif dan demokratis, yaitu independensi, imparial, dan kompetensi penyelenggara pemilu. Independensi bermakna bahwa komisi pemilihan umum tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh kekuatan /kekuasaan politik, imparial bermakna bahwa komisi pemilihan umum melaksanakan dan menerapkan hukum secara adil dan tidak memihak atau menguntungkan salah satu peserta pemilu, sedangkan kompetensi

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis independensi KPU Gowa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 di Gowa; 2) Menganalisis imparsialitas KPU Gowa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 di Gowa; dan 3) Menganalisis kompetensi KPU Gowa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 di Gowa.

Manfaat penelitian ini dapat dipilah menjadi dua, yaitu (1) secara teoritik, penelitian ini memberi informasi bagi ilmu administrasi publik dalam kajian evaluasi kebijakan publik khususnya kebijakan yang mendukung pembangunan demokrasi terkait pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dan (2) secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa rekomendasi bagi perbaikan kinerja KPU dan KPUD sebagai penyelenggara Pemilu untuk dapat melaksanakan Pilukada yang lebih demokratis.

3.2. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif kualitatif yang menjelaskan fenomena, fakta empirik secara komprehensif, dan penjelasan/eksplanasi terhadap

fakta yang melihat implementasi kebijakan Pemilukada yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.

Penelitian ini sangat urgen dilakukan karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kajian ilmu administrasi publik khususnya yang berhubungan dengan kebijakan demokrasi dan kebijakan pemilu.
2. Sampai saat ini, jumlah studi tentang analisis kebijakan publik terkait Pemilu, demokrasi, dan kebijakan politik masih sangat terbatas sehingga diperlukan untuk mengkaji sebuah kebijakan dan implementasinya.
3. Implementasi kebijakan pemilu belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan regulasi Pemilu dan masih banyaknya tindakan oleh KPU/KPUD yang tidak independen, imparial, dan tidak profesional. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi penting untuk penyempurnaan sistem pemilu/pemilukada.

Penelitian ini menjadi penopang utama dalam penyelesaian disertasi untuk program doctoral dalam bidang Ilmu Administrasi Publik yang peneliti sedang tekuni. Penelitian ini sangat diharapkan dapat menyelesaikan kendala teknis terkait penyelesaian studi doktoral peneliti.

Luaran dari penelitian disertasi doktor ini adalah: disertasi yang mendapatkan persetujuan pembimbing dan publikasi ilmiah pada jurnal internasional. Selain itu, diharapkan pula agar hasil penelitian ini dapat disosialisasikan melalui seminar

nasional yang memberikan kontribusi pemikiran baru bagi mahasiswa mengenai Ilmu Administrasi Publik dalam kajian demokrasi.

BAB 4 METODE PENELITIAN

4.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk menggali berbagai data secara mendalam mengenai demokratisasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010. Berdasarkan karakteristik penelitian tersebut maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Fathoni (2006: 99) menjelaskan bahwa studi kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung masalah atau perkara, sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya, antara lain melalui penelitian. Kasus dalam penelitian kualitatif dapat berupa individu, program, institusi, atau kelompok (Patton dalam Ahmadi, 2005:35). Terkait dengan penelitian Pemilukada di Gowa ini, sebagaimana digambarkan pada latar belakang bahwa Gowa merupakan salah satu daerah penyelenggara pemilukada yang menghadapi gugatan hukum di MK. Selain gugatan MK, masalah lain yang dihadapi penyelenggara Pemilukada di Gowa adalah Sidang Dewan Kehormatan KPU sebagai tindak lanjut gugatan dan laporan masyarakat mengenai indikasi adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

4.2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip demokrasi ini secara mendalam diupayakan menemukan berbagai data mengenai demokratisasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010. Lokasi penelitian adalah di kabupaten Gowa, dengan objeknya yaitu penyelenggara Pemilu 2010 yaitu KPU Gowa. Dengan objek penelitian KPU Gowa, maka ditetapkan bahwa lokasi pengambilan data berfokus pada KPU Gowa, baik unsur komisioner maupun sekretariat KPU Gowa pada periode 2008-2013. Lembaga penyelenggara ini beralamat di Jl.A.Mallombassarang No.69 Sungguminasa, Kabupaten Gowa.

4.3. Sumber Data

Terkait dengan kinerja ke pemilu, maka subjek penelitian ini adalah lembaga yang merupakan penyelenggara pemilu. Lembaga dimaksud, yaitu KPU Gowa dan struktur jajaran kerja yang ada pada tingkatan di bawahnya,. Lembaga tersebut, yaitu:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gowa, yang merupakan penyelenggara pemilu 2010. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengorganisir, merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilu 2010 di kabupaten Gowa.

- b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan yang membantu KPU Gowa dalam memperlancar pelaksanaan pilukada Gowa 2010.
- c. Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang merupakan penyelenggara pilukada di tingkat desa atau kelurahan yang bertugas melaksanakan pilukada berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh KPU.
- d. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS), yang bertanggung jawab melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Untuk memenuhi kecukupan dan keterpenuhan data dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan dan komparasi data dari 12 (dua belas) orang informan (*informan*), yang terdiri dari:

1. 1 (satu) orang mantan ketua KPU Gowa periode 2008-2010.
2. 1 (satu) orang mantan ketua KPU Gowa periode 2003-2008.
3. 1 (satu) orang mantan Kasubag pada Sekretariat KPU Gowa.
4. 1 (satu) orang mantan Anggota Panwaslukada Gowa 2010 yang membidangi Pelaporan dan Pengawasan Pelanggaran Pilukada.
5. Masing-masing 1 (satu) orang mantan anggota PPK dan PPS dari 2 kecamatan.
6. 2 (dua) orang dari mantan tim pemenangan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Representasi tim pemenang terdiri dari 1 orang tim pemenang dari pasangan calon yang diusung oleh partai politik dan 1 orang tim pemenang dari pasangan calon perseorangan (*independen*).

7. 1 (satu) orang aktivis LSM, peserta seleksi KPU tahun 2008.
8. 1 (satu) orang tokoh masyarakat kabupaten Gowa.

4.4. Fokus Masalah Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Independen

- a) Bebas dari campur tangan kekuasaan pemerintah/elit politik dalam pembentukannya
- b) Tidak terlibat dengan partai politik/Nonpartisan
- c) Memiliki struktur yang berjenjang/ada di setiap tingkatan
- d) Keanggotaannya terbuka pada keragaman latar belakang pekerjaan (PNS Depdagri, Akademisi, dll)

Fokus Imparsial

- a) Menerapkan hukum dan aturan pemilu secara adil dan merata kepada peserta pemilu dan konstituen pemilu
- b) Memperlakukan peserta pemilu dan masyarakat setara dan tidak berpihak kepada unsur atau golongan tertentu

Fokus Kompetensi

- a) Terlaksananya pelatihan-pelatihan teknis bagi penyelenggara pemilu

- b) Adanya informasi bagi publik mengenai tahapan pemilukada dan sistem pemilukada
- c) Tersedianya pendidikan pemilih terkait teknis pemilukada yang ditujukan kepada masyarakat sebagai pemilih
- d) Secara berkala dilakukan pelaporan mengenai tahapan pemilukada

4.5. Instrumen Penjaring Data

Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka instrument penjaring data ditentukan dengan menetapkan acuan wawancara terbuka dan kisi-kisi untuk pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD). Alat-alat yang digunakan untuk menjaring data adalah alat perekam (*tape recorder*), catatan, dan kamera untuk pengambilan foto.

4.6. Teknik Penjaringan dan Pengabsahan Data

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut ini.

1. Observasi

Peneliti telah bekerja pada kantor KPU Gowa sejak tahun 2003-2010. Keterlibatan sebagai anggota KPU Gowa selama tujuh tahun tersebut, menjadikan peneliti telah menjalani, mengetahui, dan memahami fokus penelitian dengan baik. Peneliti dapat secara terbuka memaparkan permasalahan dan peristiwa khusus terkait Pemilukada Gowa tahun 2010 yang dapat mengarah pada *autocritic* terhadap lembaga penyelenggara di kabupaten.

Disadari oleh peneliti bahwa observasi dalam pengertian pengamatan dengan pencatatan langsung (*on the spot*) atas peristiwa penelitian tidak mungkin lagi dilakukan karena Pemilukada di Gowa telah selesai. Untuk membantu peneliti, maka akurasi dan kelengkapan arsip-arsip dan dokumentasi Pemilukada Gowa tahun 2010 yang masih terjaga dengan baik, sehingga masih dapat dilakukan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi.

2. Pengalaman Personal

Peneliti secara personal memiliki pengalaman bekerja selama 7 (tujuh) tahun pada lembaga yang menjadi objek penelitian. Selama 7 tahun tersebut, peneliti menduduki jabatan Ketua Divisi Sosialisasi Informasi dan Pendidikan Pemilih (sejak tahun 2003-2008) dan selanjutnya menjabat sebagai Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu (tahun 2008-2010). Hal ini sejalan dengan pandangan

Denzin dan Lincoln (2009: 497) yang memasukkan metode pengalaman personal sebagai salah satu metode pengumpulan data empiris dalam penelitian kualitatif. Menurutnya, pengalaman personal merefleksikan ide, gagasan, dan makna pengalaman individu tertentu pada situasi kekinian. Jika pengalaman saling terkait, maka memahaminya berfungsi sebagai sebuah rentetan kisah.

3. Wawancara

Metode wawancara mendalam (*indepth interview*) digunakan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh melalui wawancara yaitu mengenai: Tata cara teknis penyelenggaraan yang disusun KPU Gowa melalui berbagai regulasi pemilukada; Mekanisme sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan selama pelaksanaan pemilukada; Tata cara perekrutan tenaga pelaksana dan penyelenggara pemilukada mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan TPS; Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan KPU Gowa ketika terjadi permasalahan teknis dalam penyelenggaraan pemilukada; Sistem koordinasi, pengawasan, dan pemantauan penyelenggaraan pemilukada; dan Dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemilukada.

Alat bantu atau perlengkapan wawancara yang digunakan yaitu *tape recorder*, ballpoint, pensil, *blocknote*, *stopmap* plastik, daftar pertanyaan, dan daftar informan.

4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini berupa pengumpulan data dokumenter, bahan-bahan visual, dan penelusuran data *on line*. Secara detail bahan dokumenter yang dijadikan sumber informasi terbagi beberapa macam, yaitu: Surat-surat, buku-buku atau catatan harian, memorial; Klipping; Dokumen dari *stakeholder* KPU Gowa, baik dari kantor pemerintah maupun pihak swasta yang melakukan kerja sama dengan KPU Gowa selama tahapan Pemilukada; Data diserver dan *flashdisk*; dan Data tersimpan di *web site*.

5. Focus Group Discussion (FGD)

FGD berlangsung dalam 2 (dua) sesi. Sesi pertama untuk memperoleh data dan informasi mengenai regulasi Pemilukada. Untuk mencapai tujuan FGD sesi pertama ini, maka peserta berasal dari kelompok masyarakat yang terdidik. Pada sesi kedua diperoleh informasi mengenai teknis penyelenggaraan Pemilukada, sehingga peserta yang hadir adalah kelompok masyarakat yang menjadi pemilih pada Pemilukada 2010 di Gowa. Peneliti menggunakan jasa LSM Baruga Cipta, yaitu sebuah LSM di kabupaten Gowa, yang telah cukup berpengalaman dalam melakukan pendampingan di masyarakat dan menguasai teknik pelaksanaan FGD.

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam FGD adalah para *stakeholder* Pemilukada, meliputi: Unsur KPU Gowa; PPK; mantan Panwaslukada; LSM/NGO; tokoh masyarakat; akademisi/guru; pemilih pemula; masyarakat

awam, dan masyarakat berkebutuhan khusus. Segmentasi peserta FGD ini ditindaklanjuti dalam dua kali kegiatan FGD.

4.7. Teknik Analisis Data

Mengacu pada tahapan yang disebutkan oleh Bungin (2007:144), maka dalam penelitian ini dilakukan tahapan analisis sebagai berikut:

- a. Data mengenai sikap independen, Imparsial, dan kompetensi sebagai penyelenggara pemilu akan diidentifikasi.
- b. Selanjutnya identifikasi data tersebut dipilah berdasarkan kategori-kategori data. Kategorisasi dibuat berdasarkan deskripsi fokus yang telah ditetapkan.
- c. Kategorisasi data yang dibuat selanjutnya ditelusuri dan dijelaskan kategorisasinya. Misalnya data-data yang melatari sehingga dikategorisasikan sebagai fokus independensi penyelenggara pemilu.
- d. Setelah ditelusuri dan dijelaskan setiap kategori, maka dijelaskan hubungan-hubungannya. Sebagai contoh, deskripsi struktur penyelenggara pemilu akan dihubungkan dengan deskripsi komposisi dan kualifikasi keanggotaan.
- e. Hubungan-hubungan dari setiap kategorisasi juga dilihat sejauh mana dapat membangun atau menemukan teori, khususnya terkait prinsip

demokrasi dalam pelayanan pemilukada sebagai salah satu bentuk implementasi kebijakan publik.

Ballarín (2002: 36) mendefinisikan konsep Decide dengan gagasan demokratisnya yang menegaskan bahwa tidak ada apa yang dapat diputuskan secara utuh. Siapa pun memiliki significant. Bahkan, demokratisasi adalah proses yang melibatkan, sebagai apa yang dimulai oleh kita yang mengalami sebuah wawancara, wawancara dan wawancara. Gagasan ini menyederhanakan kita bahwa sebenarnya kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. 'hal-hal yang lain' (others). Kemudian dan dalam penelitian ini kemudian dari wawancara yang dilaksanakan oleh para informan dan para FGD, juga dituangkan oleh sejumlah dokumen pendukung. Sebagai upaya mengaitkan dan mengaitkan data-data yang diperoleh maka data dalam pembahasan ini disajikan dengan cara-cara tertentu.

Berdasarkan tiga fokus yang telah diuraikan sebelumnya, gagasan yang disampaikan oleh Ruzar (1997), maka pembahasan penelitian ini pun terbagi menjadi beberapa kriteria fokus penelitian, yaitu independensi, integritas, dan kompetensi.

3.1. Penerapan Prinsip Independensi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah 2019

Fokus Independensi KPU Jawa Tengah penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Gowa pada tahun 2019, terdiri dari aspek independensi yaitu 1) Bebas dari

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beilharz (2002: 78) menuliskan tentang Derrida dengan gagasan dekonstruksinya yang menegaskan bahwa tidak ada teks yang dapat dipahami secara total tanpa melibatkan signifikasi. Bahwa senantiasa ada sesuatu yang terabaikan, sebuah aspek atau dimensi teks yang mengalami reduksi, terlewatkan, terberangus atau terdiamkan. Gagasan ini menyadarkan kita bahwa seharusnya kita tetap terbuka dan responsif terhadap 'hal-hal yang lain' (*otherness*). Keseluruhan data dalam penelitian ini bersumber dari teks-teks yang dikemukakan oleh para informan dan peserta FGD, juga ditunjang oleh sejumlah dokumen pemilukada. Sebagai upaya merangkai dan mensistematisasi data-data yang diperoleh, maka data dalam pembahasan ini dikaitkan dengan teori-teori tertentu.

Berdasarkan tiga fokus yang dikaji dengan pendalaman gagasan yang dikemukakan oleh Baxter (1997), maka pembahasan penelitian ini pun terkategoriisasi berdasarkan ketiga fokus penelitian, yaitu independensi, imparialitas, dan kompetensi.

5.1. Penerapan Prinsip Independensi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gowa Tahun 2010

Fokus independensi KPU Gowa sebagai penyelenggara Pemilukada di kabupaten Gowa pada tahun 2010, terdiri dari empat indikator, yaitu: 1) Bebas dari

campur tangan kekuasaan pemerintah/elit politik dalam pembentukannya; 2) Tidak terlibat dengan partai politik/Nonpartisan; 3) Memiliki struktur yang berjenjang/ada di setiap tingkatan; dan 4) Keanggotaannya terbuka pada keragaman latar belakang pekerjaan (PNS Depdagri, Akademisi, dan jenis pekerjaan lainnya). Keempat indikator tersebut dilihat penerapannya pada tingkatan seleksi KPU Gowa, KPU dan Sekretariat KPU Gowa, PPK, PPS, dan KPPS. Sebagai pengantar pemahaman awal mengenai temuan terkait penerapan prinsip independensi dalam penyelenggaraan pemilukada tahun 2010 di kabupaten Gowa, dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 1. Matriks Penerapan Prinsip Independensi
Pemilukada 2010 Oleh KPU Gowa**

INDIKATOR	TEMUAN	PEMBAHASAN
<p>campur tangan kekuasaan pemerintah/elit politik dalam pembentukannya</p> <p>struktur yang dimaksud unsur-unsur dan harus dari campur elit. Unsurnya</p> <p>Timrel KPU Gowa</p> <p>PPS, dan</p>	<p>Timrel: (Pasal 4 PKPU 13/2007)</p> <ul style="list-style-type: none"> Timrel dominan terdiri dari akademisi. Komposisi timrel: 4 akademisi, 1 tokoh masyarakat. Timrel: dibentuk tidak memenuhi keterwakilan unsur. Fakta bahwa tidak ada satupun timrel yang berasal dari unsur profesional. Juga tidak merepresentasikan keterwakilan perempuan. Timrel yang diajukan oleh DPRD Gowa tidak dilakukan melalui sidang paripurna, melainkan langsung menjadi kewenangan pimpinan DPRD. <p>KPU Gowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat calon 10 besar KPU Gowa yang 	<p>Timrel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum sepenuhnya bebas dari campur tangan elit pemerintah dan elit politik karena masih terdapatnya kuasa persona (<i>personal power</i>) oleh elit pemerintah dan kecenderungan tindakan koneksi politik (<i>political connection</i>) <p>KPU Gowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum terbebas dari campur tangan elit pemerintah dan elit politik karena masih terdapatnya kuasa persona (<i>personal power</i>) oleh elit pemerintah dan kecenderungan tindakan koneksi politik (<i>political connection</i>) dalam penentuan 10 besar calon anggota KPU Gowa dan penetapan 5 anggota KPU Gowa periode 2008-2013

	<p>tercatat sebagai warga Jeneponto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat calon 10 besar KPU Gowa yang masih menduduki jabatan struktural pada Diknas Gowa. <p>PPK, PPS, dan KPPS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendaftar calon PPK yang berstatus PNS harus memperoleh surat izin dari atasan. ▪ Camat tidak mengirimkan nama calon PPK minimal 2 kali dari yang dibutuhkan (2x5 orang = 10 orang) 	<p>PPK, PPS, dan KPPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum terbebas dari campur tangan kekuasaan pemerintah lokal yaitu Camat, Lurah/Kepala Desa, dan kepala dusun/RT/RW. <p>Masih adanya campur tangan kekuasaan pemerintah maupun elit politik dalam pembentukan timsel, KPU, PPK, PPS, dan KPPS menunjukkan bahwa aspek pembentukan penyelenggara pemilu pada Gowa tahun 2010 belum sepenuhnya independen.</p>
<p>tidak terlibat dengan partai politik Nonpartisan</p> <p>semua unsur-unsurnya sama tidak terlibat dengan partai politik Nonpartisan. Contohnya yaitu:</p> <p>Timsel KPU KPU Gowa PPK, PPS, dan KPPS</p>	<p>Timsel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 timsel KPU Gowa periode 2008, seluruhnya adalah nonpartisan <p>KPU Gowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terdapat 1 orang pun dari penentuan 10 besar calon anggota KPU Gowa dan penetapan 5 anggota KPU Gowa periode 2008-2013 yang merupakan partisan parpol. <p>PPK, PPS, dan KPPS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terdapat 1 orang pun dari seleksi PPK, penentuan PPS, dan KPPS yang merupakan partisan parpol. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh unsur penyelenggara pemilu pada Gowa tahun 2010 tidak terlibat dengan partai politik Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun penyelenggara pemilu pada Gowa 2010 yang partisan. <p>Penerapan aspek nonpartisan di seluruh tingkatan penyelenggara dan pelaksana pemilu pada Gowa 2010 menunjukkan bahwa pada aspek ini penerapan prinsip independensi telah terlaksana dengan baik.</p>
<p>memiliki struktur yang berjenjang/ada di setiap tingkatan</p> <p>struktur yang dimaksud adalah PPK, PPS, dan KPPS</p>	<p>PPK dan PPS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 orang anggota di 18 kecamatan telah terbentuk sejak bulan Januari 2010, ▪ PPK telah melakukan pemilihan ketua PPK pada akhir bulan Januari 2010. ▪ Sekretaris PPK ditetapkan oleh Bupati Gowa pada bulan Januari 2010. ▪ KPU Gowa menetapkan masing-masing 3 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbentuknya PPK, PPS, dan KPPS menunjukkan bahwa telah ada struktur yang berjenjang di setiap tingkatan. <p>Terbentuknya struktur penyelenggara dan pelaksana pemilu pada Gowa 2010 di seluruh tingkatan berdasarkan jangka waktu pembentukan sebagaimana yang diatur dalam UU 22/2007, menunjukkan</p>

<p>perpanjangan KPU Selain itu pula PPK perpanjangan Sekretaris (Gowa)</p>	<p>orang PPS masing-masing di 167 desa/kelurahan sejak bulan Januari 2010.</p> <p>KPPS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KPPS dibentuk pada bulan Mei 2010. Keanggotaannya sebanyak 7 orang di masing-masing TPS yang tersebar di 995 TPS. ▪ Telah tersedia 2 orang petugas pengamanan di 995 TPS <p>SEKRETARIAT</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KPU dan PPK telah dilengkapi dengan keberadaan Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris ▪ Sekretaris KPU Gowa dan Sekretaris PPK ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati Gowa 	<p>bahwa aspek ini telah dilaksanakan dengan baik.</p> <p>Pembentukan struktur berjenjang tersebut dengan kewenangan masing-masing menunjukkan bahwa prinsip independensi telah terlaksana dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya struktur berjenjang antara Sekretaris KPU Gowa dengan Sekretaris PPK. <p>Penetapan Sekretaris KPU Gowa dan PPK dilakukan sangat formalistik. Tujuan pembentukannya tercapai, namun proses yang dilakukan untuk penetapannya tidak mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penetapannya tidak mempertimbangkan rekomendasi Baperjakat dan prosesnya diliputi unsur koalisi dan aliansi.</p>
<p>anggotaannya pada latar pekerjaan</p> <p>ini evaluasi independensi menunjukkan abilitas masyarakat untuk komposisi anggotaan penggара (mulada)</p>	<p>KPU Gowa:</p> <p>Komposisi calon anggota KPU Gowa 2008 terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, LSM/Ornop, wiraswasta, dan pengacara.</p> <p>PPK:</p> <p>Komposisi calon anggota PPK pilukada 2010 berasal dari unsur guru/PNS, tokoh masyarakat, aktivis pemuda, dan LSM.</p> <p>PPS dan KPPS:</p> <p>Lebih dominan komposisinya berasal dari tokoh masyarakat dan aktivis pemuda.</p> <p>KPU dan PPK telah merepresentasi keterwakilan 30% perempuan, sedangkan PPS dan KPPS belum sepenuhnya dapat memenuhi 30% karena terbatasnya sumber daya manusia.</p>	<p>Komposisi keanggotaan calon di KPU Gowa, PPK, PPS, dan KPPS pilukada Gowa 2010 telah merepresentasikan keragaman latar belakang pekerjaan dan juga telah ada upaya yang signifikan untuk memberlakukan keterwakilan 30% perempuan pada tingkatan KPUD dan PPK.</p> <p>Upaya pada aspek ini menunjukkan independensi yang telah dilaksanakan dengan baik.</p>

Berikut ini temuan dan pembahasan dari setiap indikator dimaksud pada penerapannya sejak pembentukan tim seleksi KPU Gowa, pembentukan dan penetapan KPU Gowa periode 2008-2013, PPK, dan PPS hingga pembentukan KPPS berdasarkan 4 indikator independensi.

Temuan dan pembahasan mengenai campur tangan kekuasaan pemerintah/elit politik dalam pembentukan penyelenggara pemilu pada kabupaten Gowa tahun 2010 menunjukkan masih adanya campur tangan kekuasaan pemerintah maupun elit politik dalam pembentukan timsel, KPU, PPK, PPS, dan KPPS menunjukkan bahwa aspek pembentukan penyelenggara pemilu pada Gowa tahun 2010 belum sepenuhnya independen.

Pada pembentukan timsel belum sepenuhnya bebas dari campur tangan elit pemerintah dan elit politik karena masih terdapatnya kuasa persona (*personal power*) oleh elit pemerintah dan kecenderungan tindakan koneksi politik (*political connection*). Demikian pula untuk pembentukan KPU Gowa juga belum terbebas dari campur tangan elit pemerintah dan n elit politik karena masih terdapatnya kuasa persona (*personal power*) oleh elit pemerintah dan kecenderungan tindakan koneksi politik (*political connection*) dalam penentuan 10 besar calon anggota KPU Gowa dan penetapan 5 anggota KPU Gowa periode 2008-2013. Sedangkan pada pembentukan PPK, PPS, dan KPPS belum terbebas dari campur tangan kekuasaan pemerintah lokal yaitu Camat, Lurah/Kepala Desa dengan kecenderungan pola yang sama dengan yang terjadi pada pembentukan KPU Gowa.

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Setelah penelitian disertasi doktor dengan judul Demokratisasi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gowa oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah ini selesai, maka peneliti berencana untuk melakukan penelitian mengenai implémentasi kebijakan pemilu dan pilukada lainnya. Dari temuan dan hasil diskusi dengan beberapa *stakeholder*, ditemukan beberapa permasalahan yang dapat menjadi permasalahan penelitian dalam kajian demokrasi dan Ilmu Administrasi Publik.

Salah satu permasalahan yang teridentifikasi adalah yang terkait dengan keberadaan pengawas pemilu (Panwas) yang dalam beberapa kasus tampaknya tidak berperan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan pemilu/pilukada. Syafran Sofyan, tenaga profesional bidang politik Lemhanas menulis sebuah artikel mengenai permasalahan dan solusi pilukada, mengidentifikasi beberapa permasalahan pilukada termasuk keterbatasan peran Panwas. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ketidakoptimalan peran Panwas, yaitu:

1. Kontrol Panwas untuk akurasi data pemilih tidak maksimal
2. Keterbatasan anggota Panwas mengontrol hasil penghitungan suara
3. Keberpihakan anggota Panwas kepada salah satu pasangan calon

4. Anggota Panwas menjadi pembela bagi pasangan yang kalah

Berdasarkan identifikasi tersebut dan dari penelusuran terkait penelitian-penelitian dalam lingkup penggabungan antara Ilmu Administrasi Publik dan kajian keilmuan lainnya yang belum dilaksanakan secara optimal, maka peneliti memandang bahwa penelitian-penelitian dalam lingkup kebijakan pemilu dan implementasinya, merupakan sebuah ruang penjelajahan yang menarik.

Peneliti berharap bahwa selain penelitian implementasi kebijakan pemilu dalam ranah penyelenggara pemilu dan pemilukada, sesungguhnya setiap indikator dalam penelitian hibah disertasi doktor ini dapat dikembangkan menjadi sebuah penelitian lanjutan. Indikator independensi, imparialitas, dan kompetensi penyelenggara pemilu dapat dikembangkan masing-masing menjadi sebuah penelitian yang terpisah. Sebagai contoh adalah rencana peneliti untuk mendalami mekanisme pembentukan lembaga penyelenggara yang independen. Penelitian serupa ini diharapkan dapat menemukan model yang dapat menjadi patron ditemukan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang ideal dalam melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan berikut ini:

1. Penerapan prinsip independensi penyelenggaraan pemilu kabupaten Gowa tahun 2010 belum dilaksanakan dengan baik. Ketidakindependenan penyelenggara pemilu tersebut ditemukan berupa koneksi politik (*political connection*); Kuasa persona (*personal power*), dan Taktik kekuasaan (*power tactic*).dalam aspek:
 - a. Adanya campur tangan kekuasaan pemerintah/elit politik dalam pembentukan penyelenggara pemilu berupa tindakan koneksi politik (*political connection*) dan penggunaan kuasa persona (*personal power*). Campur tangan tersebut berupa intervensi pemerintah kabupaten dalam menyusun tim seleksi KPU Gowa periode 2003-2008; peranan camat dan kepala desa/lurah dalam mengajukan nama-nama anggota PPK, PPS, dan KPPS.
 - b. Keterbebasan dari partai politik (nonpartisan) telah diterapkan dalam penetapan tim seleksi KPU Gowa hingga penetapan keanggotaan KPU Gowa, PPK, PPS, dan KPPS. Tidak ditemukan data keterlibatan

penyelenggara pemilu pada Gowa 2010 sebagai anggota parpol. Data yang ditemukan hanyalah keterlibatan PPS dalam kampanye tim pemenang salah satu pasangan calon, sehingga KPU Gowa melakukan pemberhentian keanggotaan terhadap PPS dimaksud.

- c. Secara terstruktur dan berjenjang, KPU Gowa membentuk PPK di kecamatan dan PPS di tingkat desa/kelurahan. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS lebih mengarah pada *forming coalitions and alliances* oleh pemerintah setempat. Dalam regulasi pemilu pada, secara tegas telah diatur mengenai kewajiban PPK dan PPS untuk berkoordinasi dengan KPU Gowa. Namun dalam pelaksanaannya, PPK dan PPS seringkali lebih mengedepankan koordinasi dengan camat dan kepala desa/lurah. Pada tingkatan PPK dan PPS, intervensi pemerintah setempat menjadi semakin kuat dengan adanya ketergantungan PPK dan PPS dalam memanfaatkan sarana berupa gedung kantor dan fasilitas di dalamnya.
- d. Keanggotaan penyelenggara pemilu terbuka pada latar belakang pekerjaan dan unsur masyarakat, kecuali bagi individu yang terlibat sebagai anggota partai politik. Namun dalam pengajuan pencalonan di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, pemerintah setempat menciptakan kondisi yang membatasi peran individu tertentu.

2. Penerapan prinsip imparialitas penyelenggaraan pemilu pada kabupaten Gowa tahun 2010, yaitu cara KPU Gowa melaksanakan dan menerapkan

hukum secara adil dan tidak memihak atau menguntungkan salah satu peserta pemilu belum dijalankan sebagaimana yang diatur dalam regulasi pemilukada. Permasalahan yang memicu terjadinya parsialitas penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemilukada Gowa tahun 2010 adalah:

- a. Inkonsistensi antara PKPU dengan UU Pemerintahan Daerah
- b. Disharmoni antara konsideran-konsideran dalam pasal-pasal PKPU

Inkonsistensi dan disharmonisasi konsideran terutama terjadi pada tahapan penetapan daftar pemilih; pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; kampanye; penghitungan suara; dan penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

3. Pelaksanaan tugas berdasarkan kompetensi professional oleh KPUD Gowa dalam penyelenggaraan pemilukada belum optimal dalam menjalankan prinsip profesionalisme yang baik. Ketidakprofesionalan penyelenggaraan pemilukada kabupaten Gowa tahun 2010 ditemukan pada aspek-aspek:

- a. Pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh KPU Gowa lebih mengedepankan kuantitas dengan diberlakukannya pola pelaksanaan pelatihan secara kolektif di tingkat kabupaten. Demikian pula dengan booklet pelatihan-pelatihan teknis bagi penyelenggara pemilukada yang disiapkan KPU Gowa tidak secara detail dapat dijadikan panduan teknis bagi PPK, PPS, dan KPPS. Standar operasional dalam bentuk buku panduan pemilukada

disusun tanpa menyandingkan dengan juklak dan juknis pemilukada, sehingga terjadi inefisiensi dalam penerbitan surat edaran.

- b. Akuntabilitas informasi publik masih diabaikan dalam seluruh tahapan pemilukada 2010. KPU Gowa belum memiliki kesadaran bahwa pemberian informasi kepada publik merupakan tanggung jawab penyelenggara, sehingga tidak terdapat mekanisme penyajian informasi bagi publik dalam penyelenggaraan pemilukada Gowa 2010.
- c. Pendidikan pemilih tidak dirancang sesuai dengan klasifikasi pemilih. Tema kunci sosialisasi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi pemilih, dilaksanakan oleh KPU Gowa dalam 2 tahap sosialisasi. Namun demikian, masih ditemukan tidak dilakukannya sintesis dari PKPU 65/2009 ke dalam SK Pokja yang bersifat teknis. KPU Gowa melakukan ikhtisar terhadap PKPU tersebut.
- d. Tidak dilakukannya pelaporan secara berkala mengenai tahapan pemilukada. Hal ini terjadi karena tidak dilaksanakannya fungsi operasional manajemen sumber daya manusia dalam lembaga penyelenggara pemilukada di Gowa.

7.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan rumusan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Regulasi terkait pemilu dan pemilukada seharusnya dirancang melalui evaluasi yang menyeluruh. Perlu dilakukan supervisi yang menyeluruh terhadap penyusunan peraturan-peraturan KPU sehingga tidak terjadi lagi inkonsistensi dan disharmoni dalam konsideran-konsiderannya.
2. Mekanisme pembentukan tim seleksi KPU di tingkat kabupaten/kota sebaiknya tidak lagi menggunakan mekanisme penetapan oleh KPU yang berada satu tingkat di atasnya dan bupati/walikota sebagaimana yang berlangsung sejak tahun 2003-2010. Sebaiknya dipertimbangkan untuk melakukan mekanisme pembentukan tim seleksi oleh KPU dengan mekanisme seleksi terbuka (*open recruitment*) yang prosesnya juga dilaksanakan oleh KPU yang berada satu tingkat di atasnya.
3. Sekretaris KPU kabupaten/kota seharusnya menjadi posisi yang pengisian jabatannya bukan ditetapkan oleh bupati/walikota, sehingga tidak menimbulkan intervensi dan penggunaan kewenangan yang berlebihan dari pihak pemerintah daerah. Di sisi lain, mekanisme penetapan Sekretaris KPU kabupaten/kota oleh bupati/walikota juga dapat menimbulkan kesan hutang budi dari oknum yang terpilih menjadi sekretaris. Dampak lainnya adalah oknum sekretaris akan memandang bahwa atasannya adalah gubernur/bupati/walikota dan bukan KPU provinsi/kabupaten/kota, sehingga dapat terjadi penolakan atau pembangkangan terhadap hasil pleno KPU kabupaten/kota oleh Sekretaris KPU kabupaten/kota.

4. Seluruh regulasi pemilukada harus dilengkapi dengan sanksi-sanksi tegas yang mengikat bagi penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi oknum penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran.
5. Dalam penganggaran untuk pemilukada, sebaiknya ditetapkan standar dengan menggunakan rasio pemilih sehingga tidak terjadi perbedaan yang mencolok antara penyelenggaraan pemilukada satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya. Standar ini harus diatur dalam sebuah regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga bersifat tetap dan mengikat bagi KPU kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun anggaran pemilukada.
6. Akuntabilitas dan transparansi harus dikedepankan oleh penyelenggara pemilu di setiap tingkatan dalam melaporkan setiap tahapan kegiatan pemilukada. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas ini diharapkan masyarakat sebagai konstituen dapat berpartisipasi aktif untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tahapan pemilukada. Mekanisme penetapan standar akses publik terhadap informasi pemilukada harus disusun oleh KPU sebagai acuan pelaksanaan.
7. Pendidikan dan pelatihan bagi penyelenggara pemilu harus terus ditingkatkan, bukan saja terkait pemahaman hukum dan peraturan pemilukada, namun juga terkait pemahaman teknis lainnya seperti pelatihan manajemen; kearsipan; pengadaan barang dan logistik; penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi; pengelolaan keuangan; penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP); kepemimpinan dan teori organisasi; retorika; dan resolusi konflik. Pendidikan dan pelatihan ini dimaksudkan untuk membekali KPU di semua tingkatan dan jajarannya dapat memahami berbagai persoalan di luar hal-hal teknis pemilihan. Banyaknya persoalan teknis maupun nonteknis yang terjadi pascapemilukada seharusnya dapat diantisipasi dengan meningkatkan SDM KPU melalui diklat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga profesional. Bahkan jika memungkinkan, setelah menempuh diklat tersebut, peserta dari KPU dan jajarannya dapat diberikan sertifikat sebagai tanda profesionalisme di bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Denzin, Norman K dan Yvonna S.Lincoln. 2009. *Handbook of qualitative research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- IDEA. 2000. *Penilaian Demokratisasi di Indonesia: Forum untuk Reformasi Demokratis*. Jakarta: IDEA.
- _____. 2002. *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Jakarta: IDEA.
- Palazzolo, Daniel J dan James W Ceaser. 2005. *Election Reform: Politics and Policy*. United State of America: Lewxingon Books.
- Patriadi, Pandu. 2004. "Manfaat Konsep Good Governance Bagi Institusi Pemerintah dan BUMN dalam Kebijakan Privatisasi BUMN." *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Volume 8 Nomor 3, September 2004.
- Peaslee, Amos J. 1950. "Constitutions of Nation", Vol. I, Concord, New Haven: The Rumford Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Supriyanto, Didik. 2007. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: USAID-DRSP-Perludem.
- Surbakti, Ramlan, dkk. 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Tilly, Charles. 2007. *Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
PROGRAM PASCASARJANA

Kampus UNM Gunungsari Baru, Jl. Bonto Langkasa, Makassar-90222,
Telp. (0411) 830366, Telp./Fax. (0411) 855288, E-mail: pascakareba@unm.ac.id, Website: <http://www.unm.ac.id/pps>

Nomor : 1127/UN36.8/PL/2012

13 Maret 2012

Lamp : 1 (Satu) Proposal.

Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada

Yth. : **Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
cq. Kepala Balitbangda Prov. Sul-Sel
di-**

Makassar

Dalam rangka penulisan **Disertasi Doktor (S3)** pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (UNM), dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Risma Niswaty, SS, M.Si**
Nomor Pokok : **08802011**
Program Studi/
Kekhususan : **Administrasi Publik**

akan melakukan penelitian dengan judul :

**Demokratisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin penelitian .

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.


Prof. Dr. Jasruddin, M.Si
NIP. 19641222 199103 1 002

Tembusan :

- Rektor UNM (sebagai laporan)
- Asisten Direktur I dan II PPs-UNM
- KPS Adm. Publik PPs-UNM

Tetap Jaya dalam Tantangan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Jalan Urip Sumohardjo No. 269 Telp. 436936-436937 FAX. 436934
Makassar (90231)

Makassar, 10 Maret 2013

Nomor : 070.5.1/ 2272 /Balitbangda
 Lampiran : -
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. Bupati Gowa

di
 Sungguminasa

Berdasarkan surat Direktur PPs UNM Makassar nomor : 1127/UN36.8/PL/2011 tanggal 13 Maret 2012 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : Risma Niswaty, SS, M.Si
 Nomor Pokok : 08802011
 Program Studi : Adm. Publik
 Pekerjaan : Mahasiswa (S3)
 Alamat : Jl. Bonto Langkasa, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Disertasi, dengan judul :

“IMPLEMENTASI UU NO.10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD DAERAH DAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI KABUPATEN GOWA”

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 19 Maret s/d 19 Juni 2013

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab./Kota;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulsel.Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN
 Kabid Data dan Publikasi

[Signature]
 Ir. Rajendra

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19630403 199103 1 003

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
2. Direktur PPs UNM Makassar ;
3. Kepala Badan Lintas Kabupaten dan Kota Prov. Sulsel;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & LINMAS

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 28 Maret 2012

Kepada

Nomor : 070/652 /BKB.P.L/2012

Yth. Ketua KPU Kab.Gowa

Lamp :

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Di-

Sungguminasa

Berdasarkan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Nomor : 070.5.1/2979/Balitbangda tanggal 19 Maret 2012 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Risma Niswaty, SS, M.Si**
 Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 26 Januari 1972
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa (S3)
 Alamat : Taman Pesona Asri C/4

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Thesis di wilayah tempat/ saudara yang berjudul : **"DEMOKRATISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH"**.

Selama : 19 Maret s/d 19 Juni 2012

Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Gowa
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (Satu) Eksemplar copy hasil kegiatan kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Gowa

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. KEPALA BADAN
 KABID. KEWASPADAAN NASIONAL
 DAN PENANGANAN KONFLIK

(Signature)
Drs. AMRIL AMIRUDDIN, M.Si
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19730106 199303 1 004

Tembusan :

1. Bupati Gowa (Sebagai Laporan)
2. Direktur PPs UNM Makassar
3. Yang bersangkutan



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : 99/KPU.Kab.025.433280/VI/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dengan ini menerangkan :

Nama	: Risma Niswaty, SS., M.Si
Tempat/Tgl. Lahir	: Ujung Pandang, 26 Januari 1972
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa (S3) Universitas Negeri Makassar (UNM)
Alamat	: Taman Pesona Asri C/4 Sungguminasa - Gowa
Judul	: Demokratisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa terhitung sejak Tanggal 19 Maret s/d 19 Juni 2012.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Sungguminasa, 13 Juli 2012

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gowa
Ketua,

* ZAINAL RUMA, S.Pd, MM

LEMBAGA PENELITIAN

Kampus UNM Jl. A. Pangerang Pettarani, Makassar - 90222

Telepon (0411) 868879 - 884533 Fax. 868879 Email: lemlitunm@yahoo.co.id

* Puslit Kependudukan dan Lingkungan Hidup

* Puslit Pemberdayaan Perempuan

* Puslit Budaya dan Seni Etnik Sulawesi

* Puslit Makanan Tradisional, Gizi dan Kesehatan

* Puslit Pengembangan Ilmu Pendidikan

* Puslit Pemuda dan Olah Raga

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR PENDANAAN BOPTN TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : 280/UN36.9/PL/2013

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh** bulan **Mei** tahun **Dua ribu tiga belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Prof. Dr. H. Jufri, M.Pd

: Sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar yang berkedudukan di Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri, Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2 Risma Niswaty, S.S., M.Si

: Dosen FIS Universitas Negeri Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim peneliti seperti tercantum dalam proposal penelitian selaku Ketua Pelaksana Penelitian selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Disertasi Doktor Pendanaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) T.A. 2013 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian dengan judul:

Demokratisasi dan Efektivitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 2

1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp.31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)** sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor: 1294/UN36/PL/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dibebankan kepada DIPA Universitas Negeri Makassar Nomor: 023.04.2.415222/2013, tanggal 5 Desember 2012.

- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengorganisir dan memfasilitasi:
- a) Seminar Penelitian.
 - b) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Perguruan Tinggi sesuai fungsi dan peran Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk judul Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1.
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a) Menghasilkan disertasi (draf disertasi) yang telah disetujui pembimbing;
 - b) Publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional;
 - c) Menghasilkan teknologi tepat guna, HKI, buku ajar, model, atau rekayasa sosial sebagai luaran tambahan;
 - d) Mengikuti seminar penelitian;
 - e) Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian secara *online* di SIM-LITABMAS;
 - f) Menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal melalui SIM-LITABMAS dengan mengisi/mengunggah laporan kemajuan bulanan;
 - g) Mengunggah ke SIM-LITABMAS *softcopy* laporan tahunan atau laporan akhir yang telah disahkan Lembaga Penelitian dalam format pdf (ukuran *file* maksimum 5 MB), berikut *softcopy* luaran penelitian atau dokumen bukti luaran;
 - h) Menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Lengkap Penelitian;
 - i) Membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengorganisir dan memfasilitasi:
- a) Seminar Penelitian.
 - b) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Perguruan Tinggi sesuai fungsi dan peran Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk judul Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1.
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a) Menghasilkan disertasi (draft disertasi) yang telah disetujui pembimbing;
 - b) Publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional;
 - c) Menghasilkan teknologi tepat guna, HKI, buku ajar, model, atau rekayasa sosial sebagai luaran tambahan;
 - d) Mengikuti seminar penelitian;
 - e) Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian secara *online* di SIM-LITABMAS;
 - f) Menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal melalui SIM-LITABMAS dengan mengisi/mengunggah laporan kemajuan bulanan;
 - g) Mengunggah ke SIM-LITABMAS *softcopy* laporan tahunan atau laporan akhir yang telah disahkan Lembaga Penelitian dalam format pdf (ukuran *file* maksimum 5 MB), berikut *softcopy* luaran penelitian atau dokumen bukti luaran;
 - h) Menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Lengkap Penelitian;
 - i) Membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan (**Mei s.d. Desember**) dan berakhir tanggal **10 Desember 2013**, terhitung dari tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian pelaksanaan;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** dengan suatu alasan tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim;
- (3) Apabila batas waktu habisnya penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian;
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan laporan hasil penelitiannya sampai batas waktu yang telah ditetapkan pada kontrak kerja ini dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan batas waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh biaya yang bersangkutan yang belum sempat dicairkan, dinyatakan hangus (tidak dapat dicairkan kembali);
- (5) Kelalaian yang menyebabkan tidak selesainya penelitian sehingga luaran yang dijanjikan dalam proposal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak terpenuhi menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana disebut pada pasal 1 bukan plagiat atau duplikasi penelitian. Jika ternyata bahwa penelitian yang dilakukan adalah plagiat atau duplikasi penelitian, maka **PIHAK KEDUA** bersedia dibatalkan penelitiannya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan semua dana yang diterima ke Kas Negara;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara.

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan *hardcopy* laporan hasil penelitian sebanyak 8 (delapan) eksemplar dan 1 (satu) buah "soft copy".

laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- . Bentuk/ukuran kertas kuarto.
- . Warna sampul muka coklat.
- . Dibawah bagian kulit ditulis:

Dibiayai oleh:

DIPA Universitas Negeri Makassar Nomor : 023.04.2.415222/2013,
sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar
Nomor : 1294/UN36/PL/2013, tanggal 22 Mei 2013.

Softcopy laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus diunggah ke SIM-LITABMAS oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA juga diharuskan untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar laporan hasil penelitian "hard copy" langsung kepada :

- . Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jln.Salemba Raya 28A, Jakarta 10002;
- . Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
- . BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No.2, Jakarta;
- . Perpustakaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- . Fakultas masing-masing peneliti.

Pasal 8

al dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

Pembelian barang dan jasa PPN 10% PPh 22 1,5%

Belanja honorarium PPh Pasal 21:

- a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
- b. Untuk golongan IV sebesar 15%.

Dan Pajak – Pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pajak-pajak tersebut dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

ak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

asil Penugasan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 11

Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Disertasi Doktor Pendanaan BOPTN T.A. 2023 ini dibuat rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Dr. H. Jufri, M.Pd
NIP. 19591231 198503 1 016

Risma Niswaty, S.S., M.Si
NIP. 19720126 200312 2 004



Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd
NIP. 19620714 198702 1 001